

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dihadapkan oleh realita bahwa peningkatan jumlah penduduk selalu diiringi dengan besarnya permintaan pemenuhan kebutuhan baik akan barang, jasa, tempat tinggal, maupun sarana prasarana yang melayani keperluan masyarakat, tidak terkecuali juga dengan adanya permintaan kebutuhan administrasi kependudukan.

Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penerbitan dokumen kependudukan dimaksudkan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum, pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik bagi seseorang. Dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh pemerintah dan dimiliki masyarakat seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan akta kelahiran atau akta kematian, dan surat keterangan kependudukan lainnya.

Kepemilikan dokumen kependudukan menjadi *urgent* mengingat setiap aspek kehidupan sangat erat kaitannya dengan identitas diri, tetapi hingga

sekarang kita tahu bahwa kartu identitas hanya diberikan kepada orang dewasa atau penduduk dengan usia 17 tahun keatas, sedangkan untuk penduduk usia dibawah 17 tahun belum pernah mendapatkan dokumen kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selama ini anak-anak hanya tercantum dalam kartu keluarga dan akte kelahiran dan kehadiran akta kelahiran dinilai belum cukup karena akte kelahiran hanya memberikan status kepada anak. (Hardjanto, 2019).

Menjawab permasalahan tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian kartu identitas pada penduduk usia dibawah 17 tahun atau anak-anak melalui program Kartu Identitas Anak (KIA) yang berlandaskan regulasi Permendagri Nomer 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. (<https://news.detik.com/berita/d-3140935/ini-penjelasan-lengkap-mendagri-soal-kartu-identitas-anak>) pemberian kartu identitas untuk anak supaya anak sudah terdaftar identitasnya saat dewasa.

Kartu Identitas Anak menurut regulasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yaitu identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Keberadaan dan fungsi KIA bagi anak-anak hampir mirip dengan keberadaan dan fungsi KTP bagi orang dewasa. Manfaat KIA selain sebagai tanda pengenal diri, juga dimaksudkan untuk memudahkan anak mendapatkan pelayanan publik, mengingat selama ini jika anak ingin mendapatkan pelayanan publik seperti mendaftar bank, menaiki kereta api atau pesawat, harus menggunakan akta kelahiran dan kartu keluarga, dan hal ini dinilai tidak efisien.

Selain manfaat tersebut, manfaat lain yang diperoleh oleh pemegang KIA yaitu mendapatkan diskon atau promo special di tempat makan, toko buku, dan beberapa tempat-tempat umum yang telah bermitra dengan pemerintah. (<https://jateng.tribunnews.com/2019/06/20/dispendukcapil-kota-semarang-gencarkan-anak-miliki-kia-dapat-diskon-di-toko-buku-dan-tempat-wisata?page=all>)

Pelaksanaan Program Penerapan KIA dimulai pada tahun 2016 namun hanya dilakukan di 50 kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai “*pilot project*” pelaksanaan KIA di Indonesia (Linda, 2018). Pemilihan 50 kabupaten/kota sebagai “*pilot project*” pelaksanaan KIA dilihat dari kriteria cakupan penerbitan akta kelahiran tertinggi di tahun 2016. Penelitian yang dilakukan oleh Kota Semarang tidak termasuk bagian dari “*pilot project*” dikarenakan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kota Semarang hanya 70 % padahal minimal cakupan seharusnya adalah 75%. (Hardjanto, 2019).

Pelaksanaan KIA di Kota Semarang dilandaskan atas dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Kota Semarang sendiri merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan berada di posisi kelima sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Menurut Data RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, luas wilayah Kota Semarang yaitu 373, 70 km², yang terbagi atas 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan.

Menurut dokumen Laporan Kinerja Daerah RPJMD Kota Semarang Tahun 2017, jumlah penduduk Kota Semarang sebesar 1.653.035 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sejumlah 819.973 jiwa (49,60%) dan penduduk perempuan sejumlah 833.062 (50,40%). Berikut jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan kelompok umur tahun 2017 yaitu :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2017

Kelompok Umur	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
0-4	115.005	6,96
5 – 9	133.156	8,06
10 – 14	130.996	7,92
15 – 19	130.543	7,90
20 – 24	123.898	7,50
25 – 29	125.570	7,60
30 – 34	134.449	8,13
35 – 39	149.130	9,02
40 – 44	132.917	8,04
45 – 49	124.494	7,53
50 – 54	107.241	6,49
55 – 59	90.689	5,49
60 – 64	65.504	3,96
65+	89.443	5,41
Jumlah	1.653.035	100

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kota Semarang, 2017

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui jumlah persebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya yaitu jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di tahun 2017 sejumlah 1.184.435 jiwa (71,65%) dan jumlah penduduk

usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) sejumlah 468.600 jiwa (28,35%). Hal tersebut membuktikan bahwa Kota Semarang memiliki jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif.

Berkaitan dengan pelaksanaan program Kartu Identitas Anak yang ditujukan pada penduduk dengan usia 0- 17 tahun kurang satu hari yang sudah dilakukan sejak tahun 2017, jumlah penduduk kelompok usia 0 -16 tahun berjumlah 443.093 jiwa dengan realisasi penerbitan Kartu Identitas Anak sebagai berikut:

Tabel 1.2
Realisasi Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
Dindikcapil Kota Semarang Tahun 2019 Triwulan II

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Penduduk Usia 0 -16 Tahun	443.543
2	Total Cetak Tahun 2018	57.414
3	Total Cetak Tahun 2019 Triwulan II	119.141
4	Total Cetak KIA 2018 – 2019 Triwulan II	176.555
5	Anak yang belum memiliki KIA	266.988
6	Persentase Penerbitan KIA	39,81 %
7	Persentase Anak Belum Memiliki KIA	60,19 %

Sumber : Dindikcapil Kota Semarang, Juli 2019

Berdasarkan Tabel 1.2, diketahui dari tahun 2018 hingga 2019 Triwulan II, penerbitan KIA di Kota Semarang hanya sejumlah 176.555 anak, sedangkan jumlah anak yang belum memiliki KIA sebanyak 266.988 anak. Padahal dalam dokumen RPJMD target penerbitan KIA yang harus dicapai pemerintah Kota Semarang yaitu 70%, namun justru capaiannya hanya 39,81 persen. Hal ini tentu

menunjukkan bahwa efektivitas program KIA sebagai salah satu program kependudukan Pemerintah Kota Semarang masih dirasa kurang dan perlu ditingkatkan, padahal sesuai dengan amanat di Kepemilikan KIA Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, ada kewajiban bagi seluruh anak-anak usia 0-5 tahun dan 5-17 tahun kurang satu hari untuk memiliki dokumen identitas. Meratanya kepemilikan KIA juga dalam rangka mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yaitu “Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima Menuju Penduduk Berkualitas” .

Menurut Linda Rahmawati dalam skripsinya yang berjudul “ Efektifitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017”, penerbitan KIA di Kota Cilegon dalam kurun waktu 2 tahun sejak tahun 2016 hingga 2017 sebesar 69,48% atau 49,561 anak sedangkan yang belum memiliki KIA sebesar 30.52% atau 21,767 anak. Sedangkan di DKI Jakarta penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) per tanggal 31 Agustus 2019 sudah mencapai 1,6 juta.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/05/12584341/dukcapil-dki-jakarta-telah-terbitkan-16-juta-kartu-identitas-anak>

Ketidakcapaian target penerbitan KIA oleh Ida Ayu Iswariyati dkk dalam artikel yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Kota Denpasar” dalam E-Jurnal Ilmu Hukum (2018) terkait dengan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurus dokumen kependudukan, kurangnya sosialisasi kepada

masyarakat, dan keterbatasan sarana dan prasarana. Sedangkan Windi Dwi Arista dalam artikel berjudul “ Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung” dalam Jurnal Imiah Dinamika Sosial (2019) menyatakan bahwa masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang belum mengerti fungsi dan pemanfaatan KIA, selain itu daya tanggap petugas dalam melayani kurang, dan waktu pelayanan KIA dinilai sangat lama. Sedangkan Rio Nastipawa dkk dalam artikel berjudul “ Advokasi Kebijakan Kartu Identitas Anak bagi Anak Usia Dibawah 17 Tahun di Kabupeten Banyuasin” dalam *Demography Journal of Sriwijaya* (2019) menyatakan bahwa masalah pelaksanaan KIA berupa belum terlaksananya pelayanan jemput bola, belum adanya ketegasan Disdukcapil untuk melaksanakan proses mobilisasi ke mitra bisnis, belum adanya kepastian sosialisasi KIA, belum terpenuhinya dana sosialisasi KIA, belum patuhnya masyarakat mengurus KIA.

Beberapa permasalahan yang diduga melatarbelakangi terhambatnya efektivitas program KIA sebagai upaya pelayanan administrasi kependudukan oleh Dindukcapil Kota Semarang diantaranya berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus KIA (Wawancara dengan Informan 2, hari Jumat, 17 Januari 2020, pukul 08.56 WIB). Belum adanya kemudahan mengurus KIA secara online, padahal di daerah lain sudah banyak yang memberikan layanan pengurusan KIA online Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, dan Kota Surakarta. Kota Semarang hanya memberikan pelayanan online terkait dokumen akta kelahiran dan akta kematian (<https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/kabkota>). Selain itu, Dindukcapil

Kota Semarang juga masih lebih mengutamakan menyelesaikan KTP-el terlebih dahulu dibandingkan KIA (www.dispendukcapil.semarangkota.go.id)

Menyadari pentingnya program Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan oleh Dindikcapil Kota Semarang dalam memberikan hak terbaik bagi anak, maka dari itu segala hambatan dan permasalahan yang dimiliki harus segera diatasi sehingga tercipta efektivitas program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang ?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat efektivitas program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis efektivitas program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan konsep ilmu administrasi publik yang mengkaji tentang efektivitas program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang untuk dapat mengevaluasi dan meningkatkan program Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai salah satu program administrasi kependudukan terbaru, dan diharapkan bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai efektivitas program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang sejenis ini antara lain dapat diketahui dari aritkel jurnal-jurnal yang telah dipublikasikan baik dalam tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rio Nastipawa, dkk (2019) “Advokasi Kebijakan Kartu Identitas Anak bagi Anak Usia Dibawah 17 Tahun di Kabupaten Banyuasin”	Untuk mengetahui bagaimana advokasi program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin	Advokasi program Kartu Identitas masih belum optimal hal tersebut disebabkan belum terlaksananya pelayanan jemput bola, belum adanya ketegasan Disdukcapil untuk melaksanakan proses mobilisasi ke mitra bisnis, belum adanya kepastian sosialisasi KIA, belum terpenuhinya dana sosialisasi KIA, belum patuhnya masyarakat mengurus KIA.
2.	Windi Dwi Arista (2019) “Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung”	Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.	Pelaksanaan kebijakan KIA baik sudah baik karena tahapan pendataan yang sesuai SOP, sikap petugas yang tidak canggung dan cukup lugas, kemampuan SDM yang mendukung terlaksananya KIA pendistribusian KIA juga telah merata dirasakan semua golongan dan lapisan masyarakat tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai program KIA ini.

3.	Maria Melcilin Irenes & Emei Dwinanarhati Setiamandani (2019) “Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)”	Untuk mengetahui pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)	Pelayanan pembuatan KIA dilihat dari prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP, upaya peningkatan pelayanan juga dilakukan melalui jemput bola, pelayanan 3 in 1, dan kerjasama dengan instansi pendidikan, dan yayasan untuk meningkatkan pelayanan KIA.
4.	Tanti Novianti (2019) “Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran”	Untuk mengetahui sosialisasi Program KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, dan hambatan-hambatan serta upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan sosialisasi Program Kartu Identitas Anak di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran	Sosialisasi program KIA masih belum optimal karena masih ada hambatan berupa kurangnya pendekatan kepada masyarakat, belum adanya strategi mengelola waktu pelaksanaan sosialisasi, rendahnya minat masyarakat mendengarkan radio, kurangnya tenaga kerja mengelola akun media sosial, banyak daerah yang tidak mendapat sinyal internet, kurangnya kreativitas melakukan sosialisasi. Upaya telah dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu terus melakukan sosialisasi, bekerjasama dengan pemerintah setempat, bidan, dan sekolah, melakukan layanan jemput keliling, memanfaatkan media sosial dalam sosialisasi, membagikan brosur KIA ke setiap desa.
5.	Ida Ayu Iswariyati, dkk (2018) “Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Kota Denpasar”	Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Kota Denpasar serta apa saja hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan peraturan tersebut.	Pelaksanaan program KIA belum maksimal dikarenakan ada beberapa hambatan yaitu kurangnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat, maka upaya yang dilakukan yaitu membuat program pembuatan KIA sekaligus akta kelahiran, serta upaya pencetakan KIA di masing-masing kecamatan.
6.	Untung Sri Hardjanto (2019)	Untuk mengetahui kebijakan penerbitan	Pelaksanaan penerbitan KIA dilakukan dengan

	“ Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang”	kartu identitas anak di kota semarang	membuat Perda No. 4 Tahun 2016, namun pelaksanaannya dimulai tahun 2017, keterlambatan pelaksanaan karena cakupan akta kelahiran masih kurang, persiapan dilakukan Pemda melalui pendataan anak, kerjasama dengan swasta dan dinas, studi banding ke daerah yang sudah melaksanakan KIA, dan dasar pengaturannya. Kendala dalam pelaksanaan yaitu ketidakjelasan distribusi blangko KIA, keterbatasan dan keterlambatan pemberian anggaran, kurangnya SDM untuk mengoperasikan SIAK, dan belum adanya peraturan pelaksana Perda Nomer 2 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan. Upaya yang dilakukan yaitu mengadakan blangko KIA sendiri, mempersiapkan pelatihan pengoperasian SIAK, dan membuat, merancang perwal sebagai pelaksana teknis dari Perda Nomer 2 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan.
7.	Linda Rahmawati (2018) “ Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017”	Untuk melihat seberapa besar efektivitas pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2017.	Efektivitas pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2017 dinyatakan efektif karena mendapat nilai lebih dari 70%.
8.	Nurul Najidah, Hesti Lestari (2019) “ Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di	Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan faktor apa saja yang menghambat keefektifan Program Keluarga Harapan	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari dalam setiap kriteria yaitu ketepatan sasaran, ketepatan tujuan, ketepatan biaya dan ketepatan berfikir belum sepenuhnya efektif.

	Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang”	(PKH)	Faktor yang menghambat keefektifan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari yaitu koordinasi, perencanaan, dan ketepatan layanan.
9.	Kartika Febri Yuliani (2017) “Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2KM) di Kota Bandarlampung”	Untuk mengetahui bagaimana efektivitas program pelayanan kesehatan gratis di Kota Bandarlampung dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan efektivitas program pelayanan kesehatan	Program pelayanan kesehatan gratis (P2KM) di Kota Bandarlampung sudah efektif. Adapun faktor pendukung program pelayanan kesehatan gratis (P2KM) di Kota Bandarlampung yaitu Perwal Bandarlampung No.24 Tahun 2014 dan hubungan kerjasama antar lembaga pemerintahan, sedangkan faktor penghambatnya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membawa kelengkapan prosedur
10.	Yudhi Lesnata & Ulung Pribadi (2017) “ Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015”	Untuk menggambarkan dan menganalisa efektivitas program pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015 dan faktor yang mempengaruhi efektivitas program tersebut.	Belum berjalan efektif karena dalam pelaksanaan program PBRT ini belum melibatkan semua unsur terutama pihak LSM, swasta, dan masyarakat, tingkat kepuasan tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan, dana stimulan tidak mendukung, ketidakjelasan kerja kelompok pendamping.

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber.

Berdasarkan tabel 1.3, analisis terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada perbedaan dengan penelitian Rio (2019) yaitu penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui advokasi program KIA dan lokusnya di Kabupaten Banyuwangi, perbedaan dengan penelitian Windi (2019) yaitu penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program KIA dan lokusnya di Kabupaten Bandung, perbedaan dengan penelitian Maria (2019) yaitu penelitian tersebut bertujuan untuk menilai pelayanan pembuatan KIA, lokus penelitian di Kota Malang, perbedaan dengan penelitian Tanti (2019) yaitu penelitian tersebut berfokus pada sosialisasi KIA dan lokus penelitiannya di Kabupaten Pangandaran, perbedaan dengan penelitian Ida (2018) yaitu perbedaan lokus penelitian yaitu di Kota Denpasar, perbedaan dengan penelitian Hardjanto (2019) yaitu penelitian tersebut lebih menyoroti mengenai persiapan pelaksanaan program KIA, Perbedaan dengan penelitian Linda (2018) yaitu lokus penelitian di Kota Cilegon dengan pendekatan kuantitatif, dan teori efektivitas yang digunakan, serta perbedaan dengan penelitian Najidah (2019), Kartika (2017), dan Yudhi (2017) yaitu tidak membahas mengenai Kartu Identitas Anak.

Analisis terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu Rio (2019), Windi (2019), Maria (2019), Tanti (2019), Ida (2018), Hardjanto (2019) yaitu penelitian ini membahas mengenai Kartu Identitas Anak dengan pendekatan kualitatif, sedangkan dengan penelitian Linda (2018) sama-sama membahas efektivitas program Kartu Identitas Anak, serta perbedaan dengan penelitian Najidah (2019), Kartika (2017), dan Yudhi (2017) sama-sama membahas mengenai efektivitas program.

1.5.2 Administrasi Publik

Konsep mengenai administrasi publik bukanlah hal yang baru, karena sebenarnya kegiatan administrasi sudah lama dilakukan oleh suatu negara semenjak negara tersebut berdiri.

Caiden mendefinisikan administrasi publik sebagai keseluruhan kegiatan administrasi yang ada untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan publik (Mindarti, 2016:4). Publik sendiri memiliki arti "*praja*" yang diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya rakyat, sehingga keberadaan pemerintah disebut sebagai "*pamong praja*" (pelayan rakyat) yang artinya untuk melayani keperluan dan kebutuhan masyarakat, penduduk, warga negara, dan rakyatnya.

Woodrow Wilson mengartikan administrasi publik sebagai suatu cara untuk menjalankan berbagai macam aspek-aspek dalam mencakup seluruh urusan public yang artinya bahwa selain unsur pemerintah terdapat subjek lain yang juga berperan untuk mengurus urusan publik, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi nirlaba, dan lembaga bisnis karena ketiga unsur tersebut sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara nyata. (Hidayat, 2007:22)

C.T. Goodsell mendefinisikan administrasi publik sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai kehidupan yang demokratis dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat perlu dilibatkannya semua pihak dalam memberikan pelayanan publik dan saling terintegrasi dengan nilai transparansi, efektivitas, legalitas, keadilan, efisiensi, keterandalan. (Keban, 2008:8).

Berdasarkan definisi administrasi publik tersebut, maka penulis menarik kesimpulan bahwa administrasi publik merupakan proses kerjasama yang

dilakukan sekelompok orang atau lembaga yang bertujuan untuk mengelola kepentingan publik (*public affairs*) secara efektif dan efisien melalui pelaksanaan kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan.

Ilmu administrasi publik hingga saat ini telah mengalami berbagai perkembangan paradigma. Khun mendefinisikan paradigma sebagai suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. (Keban: 2008:31).

Lima paradigma administrasi publik menurut Henry (Umar, 2017: 24-28) yaitu :

1. Dikotomi Politik- Administrasi (1900-1926)

Pada periode 1900-1926 ini terlihat bahwa administrasi publik hanya menekankan pada lokus saja yaitu dimana administrasi publik ini seharusnya berada. dua fungsi pokok pemerintah yang saling berbeda satu sama lainnya yaitu antara politik dan administrasi, dan administrasi harusnya berpusat pada birokrasi pemerintah saja.

2. Prinsip Administrasi Publik (1927-1937)

Pada periode 1927-1937 terlihat bahwa administrasi dan politik tidak bisa dipisahkan, dan lokus dari dimana prinsip tersebut akan dipakai tidak menjadi penting dalam paradigma ini, yang terpenting adalah fokusnya yaitu prinsip-prinsip administrasi yaitu POSDCORB (*Planning, Organization, Staffing, Directing, Reporting, Budgeting*) dipandang dapat berlaku secara universal pada masa tersebut.

3. Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Terdapat penekanan lokus dimaa seharusnya administrasi public ini berada yaitu birokrasi pemerintahan, dan dalam periode ini fokus administrasi public dianggap kurang

4. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Ilmu administrasi public lebih banyak menekankan ke fokusnya dibandingkan dengan lokus, dan prinsip-prinsip administrasi masih tetap sama dimana pun berada atau bersifat *universal*, sehingga kurang dapat mengatasi lokusnya.

5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-kini)

Pada masa ini, administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi negara yaitu merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan (*policy science*), dan ekonomi politik.

Pada tahun 1992 muncul paradigma yang sangat reformatif yaitu *reinventing government* yang melihat bahwa pemerintah bukan sebagai pemecah masalah melainkan justru sebagai masalah itu sendiri. Paradigma Administrasi publik berkembang (Umar, 2017: 31-33) sebagai berikut :

1. *The Old Public Administration (OPA)*

Bidang administrasi dianggap sama dengan bidang bisnis sehingga harus memiliki struktur yang mengikuti model bisnis yaitu eksekutif otoritas, pengendalian yang penting memiliki struktur organisasi yang hierarki sehinggakegiatan dapat dilaksanakan secara efisien.

2. *New Public Management (NPM)*

Paradigma yang muncul karena menganggap paradigma sebelumnya yaitu OPA kurang memecahkan masalah dalam memberikan pelayanan publik. Paradigma ini menerapkan prinsip manajemen organisasi bisnis kedalam organisasi pemerintahan dengan cara meningkatkan produktifitas dan menemukan alternatif cara pelayanan public berdasarkan perspektif ekonomi, sehingga fokus pelayanan yaitu kepada *customers* bukan kepada masyarakat.

3. *New Public Service (NPS)*

Paradigma ini tidak hanya berfokus pada manajemen saja tetapi lebih diarahkan pada demokrasi, *pride and citizen* daripada *market, competition and customers sector privat*. Prinsip NPS yaitu melayani waga negara bukan pelanggan, mengutamakan kepentingan publik, berfikir strategis dan bertindak demokratis, menyadari bahwa akuntabilitas itu tidaklah mudah, melayani daripada mengarahkan, dan menghargai manusia tidak hanya sekedar produktivitas.

Posisi penelitian ini berada pada paradigma ketujuh yaitu *New Public Service* (NPS). Hal tersebut dikarenakan paradigma tersebut berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaannya juga mempertimbangkan efektivitas. Untuk mewujudkan *New Public Service* yang baik, maka dibutuhkan manajemen publik yang baik yang mampu untuk bertanggungjawab sehingga dapat mencapai tujuan dengan efektif.

1.5.3 Manajemen Publik

Kebutuhan manusia tidaklah terbatas, sedangkan sumberdaya yang dimilikinya terbatas, hal tersebut juga berlaku untuk sebuah organisasi. Organisasi juga tentunya terdiri dari banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, sedangkan sumber daya yang dimilikinya terbatas, maka dengan segala keterbatasan tersebut, dibutuhkanlah skill manajemen yang baik dan tepat.

Peter Drucker dalam Sarinah dan Mardalena memperkenalkan aliran manajemen bahwa aliran manajemen dianggap berfokus pada hasil yang dicapai dan bukan pada interkasi pegawainya, manajemen berdasarkan hasil artinya bahwa suatu cara untuk mencapai hasil yang maksimal melalui rencana yang dibuat jelas dan dapat diukur di awal pelaksanaan (Sarinah dan Mardalena, 2017: 16)

Stephen P. Robbins dan Mary Coulter dalam Sarinah dan Mardalena mendefinisikan manajemen sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manajer yang didalamnya terdapat koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga hasil pekerjaannya dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien (Sarinah dan Mardalena, 2017: 1).

Manajemen yang mengatur banyak kepentingan orang sering disebut sebagai manajemen publik. Manajemen publik sangat erat kaitannya dengan instansi pemerintahan. Overman dalam Pasolong menjelaskan bahwa manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner yang memuat aspek umum organisasi, dan gabungan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan

pengawasan di satu sisi, dan keuangan, informasi, politik, fisik, dan SDM di sisi yang lain (Pasolong, 2017: 96).

Berdasarkan pendapat ahli sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki melalui serangkaian proses *planning*, *organizing*, dan *controlling* untuk mencapai tujuan yang sesuai perintah kebijakan publik secara efektif dan efisien.

Proses manajemen (Sarinah dan Mardalena, 2017: 7-8) meliputi :

1. Perencanaan, yaitu proses meyangkut upaya yang ditempuh untuk mengantisipasi kecenderungan yang terjadi di masa depan dengan penentuan strategi dan taktik yang tepat supaya target dan tujuan organisasi dapat dicapai.
2. Pengorganisasian, yaitu bagaimana startegi dan taktik yang telah dibuat itu dapat berjalan di sebuah struktur organisasi yang tangguh dan tepat, sistem dan lingkungan yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihakdalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien..
3. Pengarahan, yaitu proses pelaksanaan program yang dilaksanakan semua pihak dalam organisasi serta kegiatan motivasi agar pihak-pihak tersebut dapat bekerja secara bertanggungjawab dan produktif.
4. Pengendalian, yaitu proses untuk memastikan agar semua rangkaian kegiatan yang berjalan dapat sesuai dengan target meskipun terdapat perubahan lingkungan.

Posisi efektivitas program berada pada pengawasan atau *controlling*, yaitu memastikan memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan,

diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan secara efektif.

1.5.4 Efektivitas

Campbell dalam Anisah dan Soesilowati mendefinisikan efektivitas merupakan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau organisasi untuk melaksanakan tugas pokoknya atau mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Anisah & Soesilowati, 2018)

Effendy dalam Amelia mendefinisikan efektivitas sebagai sebuah komunikasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan, dan jumlah personil yang telah ditentukan. (Amelia, 2015:9)

Tampieri dalam jurnal Daniel Esemé Gberevbie dan Jide Ibieta mengatakan bahwa efektivitas mengacu pada sejauh mana tujuan telah dicapai dan hubungan antara efek yang diinginkan dengan efek sebenarnya dari *output* dalam pencapaian tujuan. (Gberevbie dan Jide, 2013:51).

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Amelia) pengertian efektivitas adalah:

“Pemanfaatan sumber daya, sarana dan. prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”. (Amelia, 2015:9)

Emerson dalam Handayaniingrat mendefinisikan efektivitas sebagai suatu pengukuran mengenai tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Handayaniingrat, 2011:16)

Berdasarkan pendapat ahli tersebut maka peneliti menyimpulkan efektivitas sebagai suatu pengukuran sejauh mana tujuan yang telah ditentukan tercapai. Efektivitas menunjukkan keberhasilan tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, sehingga jika hasil kegiatan yang dilakukan semakin mendekati sasaran yang telah ditetapkan, maka semakin tinggi juga efektivitasnya.

1.5.5 Efektivitas Program

Menurut Arikunto dalam Ristiawan mendefinisikan program adalah unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan implementasi suatu kebijakan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Ristiawan, 2019:35)

Program termasuk salah satu dari bentuk kebijakan publik. Hal ini dapat dilihat dari klasifikasi bentuk kebijakan publik. Beberapa bentuk kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, peraturan pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota, Surat Keputusan Bersama, serta peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, gubernur, dan walikota. (Ristiawan, 2019:35-36).

Berdasarkan hal tersebut, maka program menjadi salah satu kegiatan yang dapat dievaluasi, dan hasil kegiatan evaluasi tersebut dilakukan untuk

meningkatkan efektivitas kegiatan. Efektivitas program menjadi sebuah cara untuk mengukur sejauh mana suatu program tersebut berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan *output* program (Ditjen Binlantas Depnaker, 1983 dalam Amelia, 2015).

Sementara itu ukuran untuk menentukan efektivitas program dapat ditentukan berdasarkan pendapat peserta program. Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Kerkpatrick (dalam Amelia) bahwa evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti. (Amelia, 2015:9)

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan, namun jika suatu usaha, hasil pekerjaan, atau tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan tidak diharapkan, maka hal tersebut dapat dikatakan tidak efektif.

Sugiyono (Yuliani, 2017 29-30) menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran program

Ketepatan sasaran diartikan sudah sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketepatan sasaran umumnya berorientasi jangka pendek dan bersifat operasional . Penentuan sasaran

yang ditetapkan individu atau organisasi sangat menentukan keberhasilan kegiatan organisasi. Demikian jika sasaran yang ditetapkan kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

2. Sosialisasi program

Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggaraan program untuk melakukan sosialisasi program, sehingga informasi mengenai pelaksanaan program tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat umum dan sasaran program khususnya. Memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena pemberian informasi dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.

3. Tujuan program

Tujuan program artinya sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Perlu adanya pentahapan yang baik, baik dari pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan perodesasinya. Pencapaian tujuan dipengaruhi oleh faktor kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang konkrit.

4. Pemantauan program

Pemantauan program artinya kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pemantauan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standard yang telah ditetapkan. Apabila terdapat hasil

yang menyimpang dari standard yang berlaku maka perlu untuk dilakukannya tindakan korektif.

Menurut Makmur (Najidah, 2019: 5-6) mengemukakan bahwa efektivitas dapat dilihat dari beberapa segi kriteria, sebagai berikut :

1. Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan sejauh mana ketepatan memanfaatkan biaya agar tidak mengalami kekurangan dan tidak mengalami kelebihan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.

2. Ketepatan berfikir

Ketepatan berfikir akan menghasilkan keefektifan, sehingga kesuksesan yang diperoleh melalui tenaga kerja yang menjalankan tugas dengan baik dan saing melakukan kerjasama yang dapat memberikan hasil optimal.

3. Ketepatan tujuan

Ketepatan tujuan merupakan aktivitas organisasi dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat dapat menunjang pencapaian efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama pada program yang berorientasi jangka panjang.

4. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Sasaran yang kurang tepat, akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Duncan (Rahmawati, 2018: 22-23) mengemukakan ukuran efektivitas dalam pengukuran efektivitas program, baik program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun swasta terdiri dari tiga aspek yang antara lain :

1. Pencapaian tujuan, yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses, sehingga supaya pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan adanya pentahapan, baik dalam pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam periodisasinya.
2. Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi melakukan kegiatan dari program kerja yang disepakati dan pengadaan kegiatan sosialisasi dengan pihak lain.
3. Adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan kondidi dan perubahan lingkungannya.

Menurut Sutrisno (Pertiwi & Nurcahyanto, 2017) mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektifitas program didalam sebuah organisasi, yaitu :

1. Pemahaman program : dapat dilihat dari sudah sejauh mana masyarakat memahami kegiatan program tersebut.
2. Tepat sasaran : dapat dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau yang menjadi kenyataan.
3. Tepat waktu : dapat dilihat dari penggunaan waktu untuk melaksanakan program yang direncanakan untul menilai apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
4. Tercapainya tujuan : dapat diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah laksanakan.

5. Perubahan nyata : dapat diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat setempat.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan haruslah tepat, jika tidak dapat menyebabkan tujuan tidak tercapai atau dengan kata lain tidak efektif. Pencapaian tujuan dari program Kartu Identitas Anak (KIA) ditujukan untuk mendata dan melindungi hak anak, dalam pelaksanaannya harus dilihat keefektifannya.

Dalam menganalisis sejauh mana efektivitas program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dispendukcapil Kota Semarang ini berjalan, peneliti menggunakan teori pengukuran efektivitas Sugiyono (Yuliani, 2017 29-30) yang menurut peneliti teori tersebut relevan untuk menjawab rumusan masalah serta permasalahan efektivitas KIA terkait rendahnya realisasi penerbitan KIA sehingga belum semua sasaran KIA di Kota Semarang memiliki KIA, dimulai dari indikator ketepatan sasaran, ketepatan tujuan, sosialisasi program, dan pemantauan program akan memudahkan pemahaman peneliti. Berikut penjabaran indikator efektivitas program menurut Sugiyono (Yuliani, 2017 29-30) yaitu :

1. **Ketepatan sasaran program** diartikan sudah sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya. Penentuan sasaran yang ditetapkan individu atau organisasi sangat menentukan keberhasilan kegiatan organisasi. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang ketepatan sasaran dari program KIA di Dispendukcapil Kota Semarang

untuk melihat sejauh mana keberhasilan sasaran yang telah dicapai oleh Dispendukcapil Kota Semarang sebagai pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan program KIA.

2. **Sosialisasi program** yaitu kemampuan penyelenggaraan program untuk melakukan sosialisasi program, sehingga informasi mengenai pelaksanaan program tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat umum dan sasaran program khususnya. Memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Dispendukcapil Kota Semarang dalam menyebarkan informasi mengenai program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang.
3. **Tujuan program** artinya sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan dipengaruhi oleh faktor kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang konkrit. Maka dalam penelitian ini peneliti akan meneliti tentang kesesuaian hasil nyata pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) dengan tujuan yang telah ditentukan oleh Dispendukcapil Kota Semarang.
4. **Pemantauan program** artinya kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pemantauan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standard yang telah ditetapkan. Maka dalam penelitian ini peneliti akan meneliti tentang upaya pengawasan yang sudah dilakukan

oleh Dpendukcapil Kota Semarang dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA).

1.5.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Najidah faktor-faktor penghambat efektivitas (Najidah, 2019: 6-7) yaitu:

1. Koordinasi;

Koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk saling mengatur atau menyepakati sesuatu.

2. Perencanaan;

Perencanaan adalah keputusan mengenai apa yang akan dikerjakan saat ini dan apa yang akan dikerjakan di masa yang akan datang.

3. Ketepatan pelayanan

Ketepatan pelayanan atau *service delivery* digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program telah dilakukan dengan tepat atau tidak.

Menurut Steers (Steers, 1985: 9-11) terdapat empat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas yaitu :

1. Karakteristik organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi. Struktur adalah hubungan yang relatif tetap dan banyak dijumpai dalam organisasi sehubungan dengan susunan SDM. Sedangkan teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah *input* mentah menjadi *output* , teknologi dipakai untuk menunjang kegiatan menuju sasaran.

2. Karakteristik lingkungan

Lingkungan mencakup dua aspek yaitu lingkungan intern dan lingkungan ekstern. Lingkungan intern dikenal sebagai iklim organisasi meliputi pekerja sentries, orientasi prestasi, kemandirian versus resiko, orientasi pada imbalan dan hukuman, , dan keterbukaan versus pertahanan. Sedangkan lingkungan eksternal yaitu semua kegiatan yang muncul diluar organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan dalam organisasi.

3. Karakteristik pekerja

Setiap pekerja memiliki pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda satu sama lainnya sehingga perbedaan individual ini dapat mempengaruhi proses organisasi dan berdampak terhadap efektivitas.

4. Kebijakan dan praktek manajemen

Variasi gaya, kebijakan, dan praktek kepemimpinan dapat mendorong dan menghambat pencapaian tujuan. Manajer berperan terhadap keberhasilan manajemen melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditujukan ke arah sasaran.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas oleh Lestana dan Ulung (Lestana dan Ulung, 2016: 10-15) yaitu:

1. Peranan pendamping

Peranan pendamping terkait dengan pengembangan kelompok sasaran yaitu membantu kelompok sasaran untuk memperkuat dinamika intern dengan memantapkan aspek keorganisasian, membantu mengidentifikasi berbagai kemungkinan atau potensi lingkungan terdekat yang dapat dikelola sebagai

usaha produktif, dan sebagai penghubung antara kelompok sasaran dengan berbagai potensi yang dimanfaatkan dari luar.

2. Partisipasi masyarakat

Partisipasi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena pemerintah sendiri memiliki banyak keterbatasan untuk melakukan kegiatan pembangunan.

3. Kemampuan kelompok sasaran

Kelompok sasaran diharapkan yang merupakan pihak yang menikmati hasil suatu program, harus ditentukan secara jelas untuk dapat memobilisasi sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.

4. Keterbatasan sumber daya

Keterbatasan sumber daya meliputi aspek keterlibatan para pemangku kepentingan untuk membantu tercapainya sasaran dan menyukseskan program yang akan dilaksanakan.

5. Struktur organisasi yang kurang memadai dan komitmen yang rendah dari pelaksana juga mempengaruhi efektivitas program.

Dalam menentukan faktor penghambat keefektifan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dispendukcapil Kota Semarang berdasarkan identifikasi masalah yang ada pada Dispendukcapil Kota Semarang, peneliti menggunakan beberapa faktor yang telah dikemukakan diatas karena faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang menjadi penghambat efektivitas program KIA yang ditemukan di lapangan dan akan dibahas pada bab 3 dan bab 4 yaitu:

1. **Perencanaan** yaitu perencanaan adalah keputusan mengenai apa yang akan dikerjakan saat ini dan apa yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. (Najidah, 2019: 6-7)
2. **Partisipasi masyarakat** yaitu sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena pemerintah sendiri memiliki banyak keterbatasan untuk melakukan kegiatan pembangunan. (Lestanata dan Ulung, 2016: 10-15)
3. **Keterbatasan sumber daya** meliputi aspek keterlibatan para pemangku kepentingan untuk membantu tercapainya sasaran dan menyukseskan program yang akan dilaksanakan. (Lestanata dan Ulung, 2016: 10-15)

1.5.7 Program Kartu Identitas Anak (KIA)

Program Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program kependudukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan melalui penerbitan dokumen kependudukan sebagai bentuk pendaftaran dan pencatatan sipil.

KIA menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016

Tentang Kartu Identitas Anak, Pasal 1 ayat 7 berbunyi :

“ Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten dan Kota”.

Tujuan program KIA dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak yaitu untuk meningkatkan

pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, dan upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK).

Kartu Identitas Anak (KIA) selain sebagai pemberi identitas untuk anak-anak juga memiliki fungsi-fungsi lain sebagai berikut :

1. Mendaftar sekolah;
2. Pembuatan dokumen keimigrasian;
3. Mendaftar BPJS;
4. Membuka tabungan/rekening di bank;
5. Berobat di puskesmas atau rumah sakit;
6. Proses identifikasi jenazah dengan korban anak-anak dan juga untuk mengurus klaim santunan kematian;
7. Mempermudah proses pencarian anak hilang;
8. Terhindarnya pemalsuan identitas anak;
9. Melindungi anak yang berhadapan dengan hukum;
10. Mencegah terjadinya illegal trafficking;
11. Mencegah terjadinya perdagangan anak; dan
12. Hal-hal pelayanan publik lainnya yang membutuhkan bukti diri si anak. Untuk

(Hardjanto, 2019)

Regulasi yang mendasari pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota, tidak terkecuali Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang antara lain:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
2. Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Indentitas Anak.
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Indentitas Anak, Pasal 3 menyatakan persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran. Sedangkan bagi anak yang sudah memiliki akta kelahiran namun belum memiliki KIA dan anak usia antara 5 tahun sampai dengan 17 tahun dapat membuat KIA dengan melampirkan persyaratan seperti fotokopi akta kelahiran, fotokopi Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi KTP elektronik orangtua/wali dan foto anak yang bersangkutan.

Prosedur penerbitan Kartu Indentitas Anak (KIA) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Indentitas Anak diuraikan sebagai berikut:

1. Batasan usia terakhir terhadap kepemilikan KIA adalah 17 tahun kurang dari 1 hari, karena berkaitan dengan batas usia kepemilikan KTP yaitu 17 tahun.
2. Pemberlakuan kartu identitas anak ini diatur sebagaiberikut:
 - a. Usia 0 sampai 5 tahun tanpa foto
 - b. Setelah berumur 5 sampai 17 tahun kurang 1 hari diterbitkan lagi dengan menampilkan foto pemilik kartu identitas anak. Setelah 17 tahun diganti dan diterbitkan KTP elektoni

Tabel 1.4
Persyaratan Penerbitan Kartu Identitas
Anak (KIA)

No	Anak WNI	No	Anak Orang Asing
1	Kurang dari 5 tahun:	1	Kurang dari 5 th:
	Mengisi formulir KIA		Mengisi formulir KIA
	FC kutipan akte kelahiran		FC paspor & izin tinggal tetap
	FC KK orang tua/wali		FC KK orang tua/wali
	FC KTP-el kedua orang tua/wali		FC KTP-el kedua orang tua/wali
2	Usia 5 th s.d 17 th (-) 1 hari:	2	Usia 5 th s.d 17 th (-) 1 hari:
	Mengisi formulir KIA		Mengisi formulir KIA
	FC kutipan akte kelahiran		FC paspor & izin tinggal tetap
	FC KK orang tua/wali		FC KK orang tua/wali
	FC KTP-el kedua orang tua/wali		FC KTP-el kedua orang tua/wali
	Pas photo 2x3 berwarna (2 lbr) Dengan ketentuan background warna merah untuk kelahiran ganjil dan warna biru untuk kelahiran genap		Pas photo 2x3 berwarna (2 lbr) Dengan ketentuan background warna merah untuk kelahiran ganjil dan warna biru untuk kelahiran genap
3	Masa berlaku:	3	Masa berlaku :
	Kurang dari 5 Th adalah sampai anak usia 5 th		Sesuai dengan izin tinggal tetap orang tua
	Lebih dari 5 th adalah s.d 17 th (-) 1 hari		

Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, 2019.

Tata cara penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak diuraikan sebagai berikut:

Tabel.1.5
Tata Cara Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

No	Anak WNI	No	Anak Orang Asing
1	Permohonan membawa berkas persyaratan dan menyerahkan ke Dindukcapil	1	Orang tua anak melaporkan ke Dindukcapil, terhadap anak yang telah memiliki paspor dengan menyerahkan berkas persyaratan
2	Kepala Dindukcapil menandatangani dan menerbitkan KIA	2	Kepala Dindukcapil menandatangani dan menerbitkan KIA
3	KIA dapat diberikan kepada permohonan atau orang tuanya di Kantor Dindukcapil atau Kecamatan atau Desa/ Kelurahan	3	KIA dapat diberikan kepada permohonan atau orang tuanya di Kantor Dindukcapil
4	Dindukcapil dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling (jemput bola di sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya)	4	Dindukcapil dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling (jemput bola di sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya)

Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, 2019.

1.6 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai dan memahami fenomena yang dikaji.

Efektivitas program merupakan suatu pengukuran sejauh mana tujuan pelaksanaan program yang telah ditentukan tercapai. Fenomena penelitian untuk

Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menggunakan teori pengukuran efektivitas Sugiyono (Yuliani, 2017 29-30) yaitu :

1. Ketepatan sasaran program

Untuk mengetahui ketepatan sasaran program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, peneliti akan melihat dari kriteria sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan regulasi Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, yang menjadi sasaran dari program Kartu Identitas Anak (KIA) adalah anak berusia 0 – 17 tahun kurang satu hari. Kriteria dari sasaran program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Kriteria Sasaran Anak Usia 0-5 Tahun
- b. Kriteria Sasaran Anak Usia 5-17 Tahun kurang satu hari

2. Sosialisasi program

Untuk melihat upaya penyampaian informasi mengenai program Kartu Identitas Anak (KIA) kepada masyarakat, maka peneliti melihat dari :

- a. Bentuk- bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
- b. Bentuk kerjasama yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

3. Tujuan program

Untuk mengetahui tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, maka peneliti melihat dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam program Kartu Identitas Anak (KIA) adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pendataan.
- b. Meningkatkan perlindungan dan pelayanan publik.
- c. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi warga negara.

4. Pemantauan program, dapat dilihat dari fenomena :

Untuk mengetahui upaya pengawasan atau pemantaun program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, maka peneliti melihat dari :

- a. Pemantauan program KIA secara internal
- b. Pemantauan program KIA secara eksternal

Untuk mengetahui faktor penghambat keefektifan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, peneliti menggunakan kriteria faktor yang mempengaruhi efektivitas dari Lesnata dan Ulung (Lestanata dan Ulung, 2016: 10-15) dan Najidah (Najidah, 2019: 6-7) sebagai berikut :

1. Perencanaan, perencanaan yang dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan program KIA di Kota Semarang.
2. Partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pemantauan program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

3. Keterbatasan Sumber Daya, sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan kebermanfaatan dari program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan desain penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Menurut Sugiyono penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang terbatas usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan yang sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta. (Sugiyono, 2016:9)

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat atau wilayah dimana penelitian ini dilaksanakan. Pada penelitian ini, lokasi atau wilayah yang dipilih adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang beralamat di Jalan Kanguru Raya No.3, Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Alasan dilakukannya penelitian di kantor tersebut karena Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil merupakan lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, termasuk didalamnya pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, teknik *sampling* yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi yaitu *purposive sampling*. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan tujuan atau pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2011:218-219). Terpilih 3 informan dari Dindikcapil Kota Semarang dan 1 orang mitra pelaksanaan program KIA. Kemudian peneliti menggunakan teknik *accidental sampling* pada informan yang kebetulan berada di tempat penelitian yang sesuai dengan konteks penelitian, terpilih 3 informan. Dengan demikian, informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dispendukcapil Kota Semarang
3. Kepala Seksi Identitas Kependudukan Dispendukcapil Kota Semarang.
4. Pihak Gramedia sebagai salah satu mitra kerjasama KIA Kota Semarang yang dipilih atas dasar saran dari Kabid Pelayanan Pendaftaran Kependudukan.

5. Tiga Pemohon KIA di Kantor Dindikcapil Kota Semarang yang terdiri dari 1 orang yang berprofesi sebagai satpam, dan 2 orang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga.

1.7.4 Jenis Data

Lofland dan Lofland dalam Moleong menjelaskan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata*, dan *tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. (Moleong, 2007: 157). Penelitian ini menggunakan jenis data yang dipakai yaitu :

1. Kata-kata dan tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai yang merupakan sumber data utama dalam penelitian yang kemudian sumber data utama tersebut dicatat melalui catatan tertulis, rekaman *video/audio tapes*, dan pengambilan dokumentasi.

2. Sumber tertulis

Sumber tertulis terbagi menjadi sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Sumber tertulis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, data terkait realisasi penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Dispendukcapil Kota Semarang, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, Laporan Kinerja Daerah RPJMD Kota Semarang, jurnal Program Kartu Identitas Anak.

3. Foto

Foto sebagai data atau sebagai pendorong ke arah menghasilkan data. Dalam penelitian ini terdapat foto yang diambil berdasarkan observasi lapangan langsung oleh peneliti maupun dokumentasi pendamping program Kartu Identitas Anak (KIA).

1.7.5 Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2007:166). Sumber didapatkan langsung dengan menggunakan wawancara secara mendalam kepada narasumber yang dapat diperoleh dari sumber langsung yaitu informan, kemudian diolah sendiri oleh peneliti. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Kepala Dindikcapil Kota Semarang, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dindikcapil Kota Semarang, Kepala Seksi Identitas Kependudukan Dindikcapil Kota Semarang, mitra kerjasama KIA dan 3 (tiga) pemohon yang mengajukan permohonan Kartu Identitas Anak.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2007:156). Data sekunder diperoleh dari studi pustaka atau bahan informasi lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik dari tinjauan pustaka maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan

penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti, Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Laporan Kinerja Daerah RPJMD Kota Semarang, data terkait realisasi penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Dispendukcapil Kota Semarang, jurnal Program Kartu Identitas Anak, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat empat teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/tringulasi. (Sugiyono, 2007:225).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan beberapa teknik yaitu :

1. Observasi

Peneliti dalam penelitian ini melakukan pengamatan secara langsung di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mengetahui bagaimana efektivitas program Kartu Identitas Anak.

2. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. (Sugiyono, 2016:231). Penelitian ini menggunakan wawancara tak berstruktur (*unstructured*

interview). Sugiyono mendefinisikan wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. (Sugiyono, 2016: 233).

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2016: 240). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Buku Kartu Identitas Anak (KIA), Laporan Kinerja Daerah RPJMD Kota Semarang, data terkait realisasi penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Dispendukcapil Kota Semarang, jurnal Program Kartu Identitas Anak.

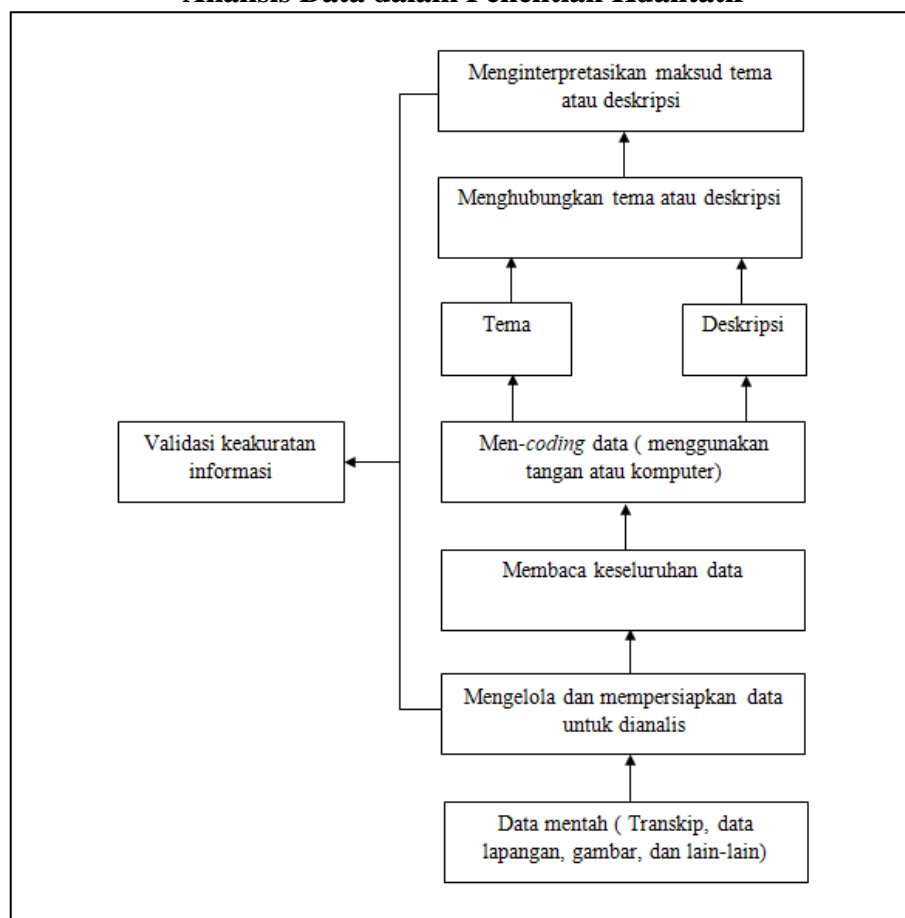
1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. (Moleong, 2009:248).

Penelitian kualitatif perlu untuk menentukan langkah-langkah dalam menganalisis berbagai bentuk data kualitatif yang secara umum tujuannya untuk memahami data teks dan gambar. Informasi yang terdapat dalam data teks dan

gambar yang padat tidak seluruhnya dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, maka dari itu diperlukan proses memfokuskan pada beberapa data dan mengabaikan data lainnya sehingga hasil yang didapat dari proses ini adalah untuk mengumpulkan data menjadi sejumlah tema kecil yaitu sekitar lima atau tujuh tema. (Creswell, 2014:245).

Gambar 1.1
Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif



Sumber : Creswell, 2014, hlm 247

Pendekatan tersebut dapat dijabarkan melalui langkah-langkah analisis berikut ini :

- a. Langkah 1. yaitu mengaur dan menyiapkan data yang akan dianalisis. Data yang dianalisis meliputi transkrip wawancara, mengetik data lapangan, membuat catalog semua materi visual, mengatur dan menyortir data kedalam berbagai jenis sesuai tergantung sumber informasi.
- b. Langkah 2. Membaca atau melihat semua data yang dimiliki, langkah ini untuk memberikan kesempatan merenungkan arti keseluruhan informasi. Ide umum apa yang sedang peserta coba katakan, apa gagasan utamanya ?, apa kesan yang didapatkan dari kedalaman, kredibilitas, dan penggunaan informasinya ?. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara menulis transkrip atau menulis pengamatan lapangan, merekam apabila bentuknya suara, dan apabila bentuknya visual bisa dilakukan dengan membuat sketsa ide.
- c. Langkah 3. Memulai mengkode data. Rosman & Rallis dalam Creswell mendefinikan koding data sebagai proses mengelola data dengan tanda kurung potongan (bagian gambar atau teks) dan menulis kata yang menggambarkan sebuah kategori dalam margin. (Creswell, 2014:247). Koding data melibatkan pengambilan data teks atau gambar yang sudah dikumpulkan dan mengelompokkannya kedalam kalimat atau paragraf kedalam kategori dan memberi label (istilah) pada kategori tersebut.
- d. Langkah 4. Menggunakan proses pengkodean untuk mendapatkan deskripsi tentang *setting*, orang-orang, kategori, atau tema untuk dianalisis. Deskripsi melibatkan usaha penyampaian tentang orang, tempat atau acara dalam suatu *setting*. Peneliti dapat mendapatkan kode untuk deskripsi ini. Analisis ini dapat digunakan untuk mendesain deskripsi terperinci untuk studi kasus,

etnografi, dan narasi, selain itu kode dapat digunakan untuk menghasilkan sejumlah kecil tema atau kategori, mungkin lima hingga tujuh tema untuk studi penelitian. Tema-tema yang muncul ini biasanya merupakan tema utama temuan dalam studi kualitatif dan sering digunakan sebagai judul dibagian temuan (atau dalam bagian temuan disertasi atau tesis) dari studi, meskipun begitu masih harus menampilkan berbagai perspektif individu yang diperkuat dengan kutipan atau bukti spesifik.

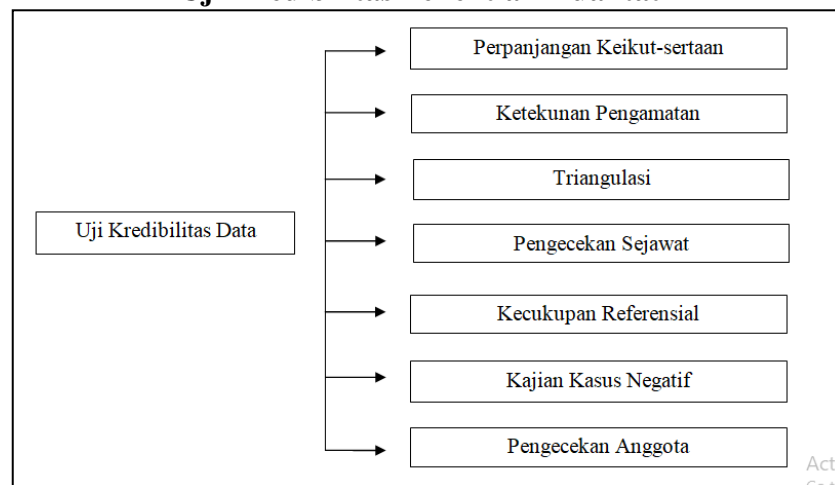
- e. Langkah 5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema ini akan ditampilkan dalam penelitian kualitatif. Pendekatan yang paling sering digunakan adalah pendekatan naratif untuk menyampaikan hasil temuan analisis.
- f. Langkah 6. Langkah terakhir dalam analisis data yang melibatkan interpretasi atau pemaknaan dalam penelitian kualitatif. Interpretasi dapat berupa interpretasi pribadi penulis Mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu dijawab bukan yang berasal dari ramalan peneliti.

1.7.8 Kualitas Data

Keabsahan data dimaksudkan sebagai usaha untuk meningkatkan derajat kepercayaan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga sekaligus menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh penelitian kualitatif. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan uji kredibilitas yang mempunyai

maksud untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti

Gambar 1.2
Uji Kredibilitas Penelitian Kualitatif



Sumber : Moleong, 2009, hlm 327

Kualitas data dalam penelitian ini diperoleh dengan memeriksa keabsahan data hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut. Terdapat empat macam triangulasi yang dapat digunakan yaitu triangulasi yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Pengujian kualitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda misalnya hasil wawancara dicek menggunakan observasi dan dokumentasi.